

PERAN UNITED NATION WORLD FOOD PROGRAMME (UNWFP) MENANGGULANGI KRISIS PANGAN ZIMBABWE TAHUN 2019-2023

Fitri Al Istiqomah¹⁾*

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

* corresponding authors: fitri.al@ui.ac.id/fitrialistiqomah@gmail.com

ABSTRAK

Zimbabwe kembali menghadapi krisis pangan parah akibat Topai Idai dan pandemi Covid-19 yang memunculkan ancaman serius pada ketahanan pangan meskipun sempat membaik pada tahun 2017. Menanggapi ini, Zimbabwe menerima dukungan dari UNWFP dan berhasil keluar dari sepuluh negara krisis pangan terburuk. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran UNWFP dalam menangani krisis pangan di Zimbabwe pada 2019–2023 dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, yang dianalisis melalui teori peran organisasi internasional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UNWFP berperan sebagai instrumen, namun perannya sebagai arena dan aktor masih terbatas akibat implementasi yang didominasi otoritas pemerintah Zimbabwe. Penelitian ini berkontribusi dalam kesenjangan literatur keterbatasan peran organisasi akibat faktor domestik. Secara praktis, temuan ini menyoroti pentingnya sinergi antara organisasi internasional dan pemerintah lokal dalam memastikan implementasi dan efektivitas program ketahanan pangan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan peran tiap aktor dalam menangani krisis pangan.

Kata Kunci: Peran Organisasi Internasional, Bantuan Pangan, Krisis Pangan, UNWFP, Zimbabwe

ABSTRACT

Zimbabwe has once again faced a severe food crisis due to Cyclone Idai and the Covid-19 pandemic, which posed a serious threat to food security despite previous improvements in 2017. In response, Zimbabwe received support from UNWFP and managed to exit the list of the ten worst food crisis countries. This research aims to explain the role of the UNWFP in addressing the food crisis in Zimbabwe from 2019 to 2023, using qualitative methods and desk research, and is analysed through role of international organizational theory. The findings show that the UNWFP served as an instrument, but its roles as an arena and actor remained limited due to implementation being dominated by Zimbabwean government authorities. This study contributes to the literature gap concerning the limited roles of international organisations due to domestic factors. Practically, it highlights the importance of synergy between international organisations and local governments, as well as the need for transparency and accountability in aid management to enhance the effectiveness of food security programmes.

Keywords: Role of International Organizations, Food Assistant, Food Crisis, UNWFP, Zimbabwe

PENDAHULUAN

Krisis pangan merupakan isu global yang mengancam keberlangsungan hidup manusia yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Ketidaktahanan pangan adalah kondisi tidak terpenuhinya empat elemen *food security*¹ atau ketahanan pangan yang ditetapkan FAO yakni kondisi ketika semua orang, kapan pun, memiliki akses terhadap makanan yang bergizi dan aman secara ekonomi dan fisik dalam memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 1996). Krisis pangan merupakan kondisi ekstrem saat individu atau kelompok mengalami ketidaktahanan pangan seperti kelaparan yang berisiko kematian dan memerlukan pertolongan darurat. Krisis pangan dan ketidaktahanan pangan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut laporan dari *Global Report on Food Crises* menunjukkan sekitar 258 juta orang dari 58 negara mengalami ketidaktahanan pangan (UN, 2023). Menurut WFP, sebanyak 7.7 juta orang atau setengah dari populasi penduduk Zimbabwe mengalami krisis pangan buruk dalam satu dekade terakhir (UN, 2019). Kurang lebih 270.000 penduduk Zimbabwe dan 341 lainnya dinyatakan meninggal dunia serta 50% hasil pertanian rusak terdampak bencana topan tropis Idai yang melanda wilayah selatan Afrika di Maret 2019 (IFRC, 2020). Pemerintah Zimbabwe menyatakan krisis pangan yang terjadi di 2019 merupakan ancaman keamanan level nasional. Sebanyak kurang lebih 4,3 juta penduduk Zimbabwe telah berada ditingkat krisis atau lebih buruk yang artinya sangat membutuhkan bantuan pangan darurat (FSIN, 2021).

Meskipun telah mengalami peningkatan pasokan pangan pada tahun 2017 dengan menghasilkan panen jagung dan sereal 4 kali lipat lebih banyak dibanding tahun 2016. Seperti yang terlihat pada tabel 1, yaitu dari -31% menjadi 321%, berdasarkan laporan dari *Food Security Information Network* (FSIN) tahun 2018. Perubahan iklim menyebabkan hasil panen turun menjadi -21% pada 2018, lalu memburuk lagi menjadi -54,32% pada 2019. Angka ini lebih rendah dibanding

¹ Menurut World Food Summit (1996) terdapat empat (4) elemen utama dalam ketahanan pangan (*food security*) yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau wilayah yakni ketersediaan pangan (*food availability*), akses atas pangan (*food access*) secara ekonomi maupun fisik, pemanfaatan pangan (*food utilization*) berupa nutrisi dan kualitas pangan, dan berkelanjutan (*stability*).

tahun 2015 yang mencapai -49%. Penurunan panen ini menjadi krisis pangan terparah yang pernah dialami Zimbabwe setelah tahun 1992 dan 2002.

Tabel 1. Produksi Jagung Zimbabwe Tiap Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai	Change (%)
2015	742	-49,04%
2016	512	-31,00%
2017	2.156	321,09%
2018	1.701	-21,10%
2019	777	-54,32%

Sumber: *Zimbabwe-Maize Production Quantity* (World Data Atlas, 2020)

Merespons hal tersebut, banyak negara dan organisasi internasional yang memberikan bantuan luar negeri berupa bantuan pangan kepada Zimbabwe. Organisasi internasional yang ikut dalam merespons krisis pangan Zimbabwe adalah *United Nations World Food Programme* (UNWFP). UNWFP atau sering disebut WFP adalah organisasi kemanusiaan yang berusaha untuk menolong nyawa dalam keadaan darurat melalui bantuan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan (WFP, 2023g).

Berkat hal tersebut, Zimbabwe dapat keluar dari peringkat 10 besar negara dengan krisis pangan terparah dengan total penduduk yang masih rawan pangan menurun menjadi 3.8 juta pada tahun 2021 (FSIN, 2022). Namun, Perwakilan WFP, Francesca Erdelmann mengatakan bahwa di saat Zimbabwe sedang merayakan ketersediaan pasokan sereal yang cukup, WFP juga mengakui masih banyak rumah tangga miskin yang masih tidak mampu membeli makanan (Langa, 2023). Meskipun sudah lebih 20 tahun WFP ikut membantu Zimbabwe menangani krisis pangan.

Upaya WFP dalam menangani krisis pangan di Zimbabwe menjadikan WFP menarik untuk diteliti sebagai organisasi internasional dalam memberikan bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis “Bagaimana peran *United Nations World Food Programme* (UNWFP) dalam mengatasi krisis pangan di Zimbabwe tahun 2019-2023?” dan juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran organisasi internasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di suatu negara. Penelitian ini tidak hanya

berkontribusi dalam memahami peran UNWFP tetapi juga menambah wawasan dalam kajian kebijakan luar negeri dalam konteks bantuan pangan di negara yang mengalami krisis pangan.

KAJIAN PUSTAKA

Upaya penanganan krisis pangan di Zimbabwe dapat dikatakan memiliki tantangan dan perkembangan yang awalnya berfokus pada sekedar bantuan darurat kini berfokus pada upaya berbasis ketahanan. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa bantuan pangan dan transfer tunai yang dilakukan, memberikan solusi jangka pendek. Namun, upaya tersebut masih belum cukup untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Chipato dan Wang (2019) menemukan bahwa inisiatif bantuan pangan di Provinsi Masvingo, Zimbabwe melalui bantuan makanan gratis memberikan dampak jangka pendek dibandingkan program penciptaan aset produktif yang dapat menjadi alternatif mata pencaharian.

Adapun, Ndlovu, T., & Ndlovu, S (2019) menunjukkan bahwa bantuan transfer tunai dapat juga mendukung kewirausahaan lokal dan akses atas pangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam metode bantuan transfer, menurut studi yang dilakukan Ndlovu, et.al (2021) dampak dari bantuan metode ini masih belum konsisten karena nilai bantuan yang rendah, distribusi yang tidak teratur dan tidak merata, dan/atau sistem penargetan yang buruk. Upaya penanggulangan melalui bantuan-bantuan ini diberikan oleh negara atau organisasi internasional yang bisa merupakan upaya mandiri maupun kolaborasi kemitraan.

Selain itu, penelitian sebelumnya tentang ketahanan pangan Zimbabwe mayoritas berfokus pada dampak perubahan iklim dan krisis ekonomi sebagai penyebab utama krisis pangan. Namun, penelitian yang membahas spesifik peran UNWFP sebagai aktor internasional dalam krisis pangan di Zimbabwe masih minim. Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peran Organisasi Internasional

Setiap organisasi internasional memiliki peran-peran yang dimainkan dalam sistem dan memiliki fungsi tertentu. Menurut Inis Claude (1964:4) dalam buku

Archer (2001), organisasi internasional adalah sebuah proses, berupa aspek-aspek representatif untuk menggambarkan proses dalam suatu periode waktu. Beberapa ilmuwan merujuk organisasi internasional sebagai institusi internasional, sebuah komite, majelis, dewan, atau kesekretariatan (Archer, 2001).

Adapun elemen penting yang harus dimiliki organisasi internasional adalah keanggotaan, tujuan, dan struktur (Archer, 2001) yang dapat beranggotakan negara atau aktor non-negara. Menurut Archer, organisasi internasional memiliki tiga peran utama yang dapat membantu menjelaskan bagaimana peran organisasi internasional dalam struktur internasional dalam melihat suatu isu atau fenomena yang dihadapi yakni instrumen, arena, dan aktor.

Organisasi internasional (OI) berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu atau kebijakan masing-masing pemerintah negara anggota. Menjadi sarana bagi negara-negara anggota untuk berdiplomasi yang pelaksanaannya hanya bisa melalui multilateral. Organisasi menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan nasional, tergantung sejauh apa tujuan yang ingin diraih (Myrdal 1955, dalam Archer, 2001).

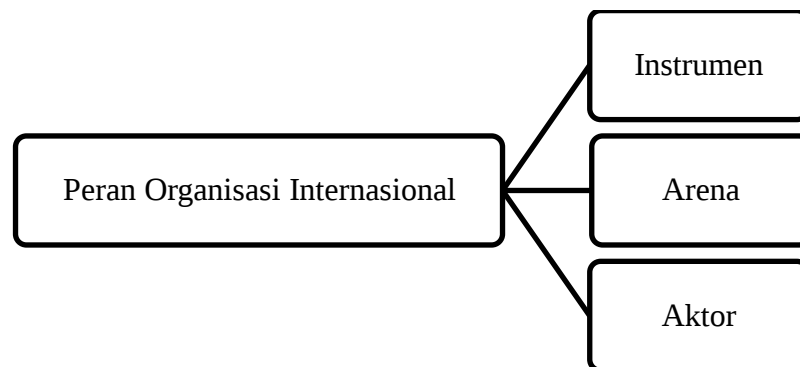
Organisasi internasional menjadi arena atau forum yang digunakan para aktor untuk melakukan tindakan. Organisasi menyediakan tempat pertemuan ketika negara-negara anggota/anggota dapat berkumpul atau bertemu untuk berdiskusi, berdebat, mengatur kerja sama, atau menyelesaikan perselisihan atau sebaliknya (Archer, 2001). Arena yang disediakan oleh OI ini sifatnya netral dan dapat digunakan oleh semua anggota OI. Dengan kata lain, OI memberikan sarana kepada anggotanya untuk saling membahas atau mengajukan pendapat atau sudut pandang terkait suatu isu di forum publik yang lebih luas dari diplomasi bilateral.

Organisasi internasional juga berperan sebagai aktor dalam sistem internasional. OI menjadi aktor yang independen atau independen dengan suatu negara meskipun anggota OI adalah negara-negara. Artinya, OI dapat bertindak di level internasional tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, melainkan dapat mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa global (Archer, 2001). Menurut Wolfer (1962) dalam Archer (2001) kapasitas aktor sebuah OI sangat bergantung pada “resolusi, rekomendasi, atau perintah dari bagian-bagiannya” yang dapat

memaksa atau mempengaruhi kebijakan atau perilaku negara-negara anggotanya sehingga keaktorannya dapat dibedakan dengan keaktorannya dari anggotanya.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori *role of international organizational* oleh Clive Archer (2001), maka variabel yang dapat menjelaskan konteks pada kasus ini ialah: instrumen, arena, dan aktor. Adapun operasionalisasi teori dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2.2 Operasionalisasi Teori *Role of International Organization*



Sumber: Diolah dari Archer (2001) oleh penulis (2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif-deduktif untuk menjelaskan bagaimana UNWFP berperan dalam menangani krisis pangan di Zimbabwe berdasarkan kerangka peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti mengategorikan data berdasarkan kerangka teoritis dan pengetahuan yang sudah ada (Lamont, 2015).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer yang diperoleh dari laporan resmi UNWFP, laporan organisasi internasional terkait, dan dokumen kebijakan pemerintah Zimbabwe. Serta data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan artikel berita. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan.

Data dianalisis dengan pendekatan interpretatif melalui tiga langkah yaitu reduksi data untuk memilah dan menyaring data yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian penyajian data, berupa pengorganisasian data untuk memudahkan dalam menganalisis. Terakhir, interpretasi dan penarikan kesimpulan

dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori peran organisasi internasional dari Clive Archer (2001). Adapun keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNWFP: Alat Bantuan atau Sekadar Mitra Zimbabwe

Organisasi internasional sebagai instrumen, artinya organisasi digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara yang mengalami masalah. Dalam upaya mengatasi krisis pangan yang terjadi di Zimbabwe, Zimbabwe mendapat bantuan pangan dari UNWFP atau WFP. *World Food Programme* (WFP) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1961 oleh PBB yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kelaparan di dunia (Britannica, 2023).

Bantuan pangan ini bertujuan untuk membuka peluang stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian bagi mereka yang baru pulih dari bencana, dampak perubahan iklim, dan konflik (WFP, 2023g). WFP memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah Zimbabwe, yaitu membantu negara yang mengalami krisis pangan yang berkepanjangan. Kehadiran UNWFP di Zimbabwe sudah dimulai sejak tahun 1984, awalnya kehadirannya untuk menyalurkan bantuan pangan ke negara-negara tetangga Zimbabwe seperti Malawi, Mozambique, dan Zambia (Gallar, 2023). Sejak saat itu, UNWFP aktif memberikan bantuan langsung ke Zimbabwe, termasuk menyediakan bahan pangan pokok seperti jagung dan transfer uang tunai kepada 12.000 pengungsi di kamp pengungsian setiap bulannya (WFP, 2023a).

Krisis pangan besar pun kembali melanda Zimbabwe pada tahun 2002 akibat perubahan iklim ekstrem dan gejolak ekonomi. Sejak saat itu hingga tahun 2023, UNWFP telah membantu Zimbabwe selama lebih dari dua dekade. Meski sempat mengalami peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2017-2018, kondisi memburuk kembali pada 2019 hingga 2022. Dalam periode tersebut, Zimbabwe masuk dalam daftar *Hunger Hotspots* karena bencana akibat perubahan iklim yang

ekstrem dan musim hujan yang tidak menentu yang mengakibatkan penurunan produksi tanaman dan juga efek inflasi yang tinggi (Gallar, 2023).

Pemerintah Zimbabwe sebagai aktor dalam pelaksanaan program peningkatan pangan untuk mengatasi krisis pangan sangat berperan penting. Pemerintah Zimbabwe merupakan anggota WFP sekaligus mitra WFP dan memegang otoritas yang lebih tinggi di banding WFP. Sehingga dalam pelaksanaan program- program ketahanan pangan, pelaksana utamanya adalah pemerintah dan WFP berperan sebagai instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk membantu Zimbabwe keluar dari permasalahan ini seperti memberikan bantuan pangan dan dana.

WFP menghadaou kendala sebagai aktor karena minimnya koordinasi antara kebijakan dengan pelaksanaan oleh pemerintah. Hal ini membuat peran WFP cenderung terbatas sebagai instrumen negara. Pemerintah Zimbabwe memiliki komitmen nasional dan regional dengan mendirikan lembaga khusus ketahanan pangan dan nutrisi yaitu *Food and Nutrition Councils* (FNC). FNC berperan sebagai agen yang mendukung para pemangku kebijakan dengan menyediakan data terkait pasokan pangan dan gizi untuk berbagai penilaian (FNC, 2024). Komitmen pemerintah Zimbabwe juga dilanjutkan ke level internasional dengan tergabung pada organisasi seperti SUN, SADC, dan bermitra dengan WFP.

Salah satu bentuk akomodasi kepentingan nasional Zimbabwe dalam menangani masalah ini tercermin dari penyusunan *Country Strategic Plan* (CAP) bersama WFP. Penyusunan CAP menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan tujuan Zimbabwe dan program-program WFP secara strategis. CAP merupakan rancangan strategis per lima tahun sekali yang diawasi oleh WFP, dibuat untuk dan oleh negara sebagai pembelajaran, bahan diskusi, tinjauan dan evaluasi proyek dan pendanaan oleh pemerintah, donor, maupun mitra (WFP, 2017). Sejak tahun 2017, Zimbabwe telah memiliki dua CAP yang digunakan yaitu CAP 2017-2021 dan CAP 2022-2026 yang disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional Zimbabwe dan komitmen Zimbabwe terhadap agenda SDGs 2023.

Pemerintah Zimbabwe dan WFP juga menandatangani *Letter of Understanding* (LoU). LoU menjadi simbol kesepakatan antara kedua pihak dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan. LoU ini memuat komitmen bersama

untuk memperkuat respons terhadap keadaan darurat pangan dan kerangka kerja yang akan digunakan dalam mendefinisikan krisis pangan penyamaan proyek-proyek apa saja yang dapat dilakukan dan dapat dikoordinasikan bersama. LoU penting karena menunjukkan persetujuan untuk melakukan kolaborasi pemerintah dan WFP dalam mengupayakan peningkatan ketahanan pangan Zimbabwe dan reformasi sistem perlindungan sosial (WFP, 2023d).

Namun, dalam implementasinya pemerintah Zimbabwe mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial dan justru membuat kondisi pangan Zimbabwe semakin memburuk meskipun telah mendapat bantuan dari WFP dan donor lain. Tantangan berupa kurangnya koordinasi antara pemerintah Zimbabwe dan WFP ini dapat dilihat dari bagaimana peran pemerintah Zimbabwe dalam merespons krisis pangan.

Dimulai pada tahun 2018, saat terjadi pergantian kepemimpinan presiden Zimbabwe yaitu Presiden Robert Mugabe yang lengser dari jabatan karena kudeta militer di tahun 2017 setelah memimpin selama hampir 30 tahun, dan digantikan oleh Presiden Emmerson Mnangagwa. Di awal kepemimpinannya Presiden Mnangagwa mencabut larangan impor barang pokok yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Robert Mugabe pada tahun 2016 (FAO, 2018). Presiden Mnangagwa juga berjanji untuk menyelesaikan permasalahan harga dan penggunaan mata uang dolar. Pencabutan larangan tersebut diharapkan dapat memulihkan manufaktur dan membendung kekurangan pasokan pangan di kalangan masyarakat serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2019, pemerintah Zimbabwe kembali mengeluarkan kebijakan yang melarang para petani Zimbabwe untuk melakukan perdagangan langsung komoditas jagung dan gandum melalui *Statutory Instrument 145 of 2019* tentang regulasi pemasaran gandum dan pengendalian penjualan jagung (S. I. 145 of 2019, 2019). Kebijakan tersebut membuat penduduk Zimbabwe tidak dapat membeli atau menjual produk pangan selain melalui lembaga pangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Dewan Pemasaran Gandum. Apabila ditemukan melanggar kebijakan ini, maka akan diberikan sanksi hukuman tahanan penjara selama dua tahun dan denda.

Kebijakan ini oleh pemerintah Zimbabwe dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan Zimbabwe namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Berdasarkan laporan dari *Global Press Journal*, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Zimbabwe ini membuat petani jadi tidak mudah untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat (Majuru, 2019). Selain itu, proses jual beli jagung yang dilakukan melalui Dewan Pemasaran Gandum memiliki batas tiap harinya yaitu lima kantong dengan masing-masing 50 kilo gram gandum atau jagung (S. I. 145 of 2019, 2019) dan hanya menggunakan mata uang Zimbabwe sedangkan banyak keperluan pertanian yang hanya dapat dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat.

Kebijakan ini berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah karena justru memunculkan penyeludupan pasokan jagung ke luar negeri dan memunculkan pasar gelap di kalangan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat, Mufadzwa warga Epwort. Ia menyampaikan bahwa intervensi pemerintah dalam mengatur harga pasar dan transaksi jual beli gandum ini meningkatkan permintaan atas pasokan pangan. Namun karena pasokan yang dapat diakses dan dijual terbatas membuat banyak pemasok menjual ke pasar gelap dengan harga 70-100 dolar ZWL per kantongnya (WFP, 2020b). Kebijakan ini membuat harga pangan tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah Zimbabwe melainkan dikendalikan oleh pasar gelap (WFP, 2020b).

Kebijakan tersebut membuat bantuan yang diberikan oleh WFP melalui Transfer Tunai menjadi tidak terlalu berdampak positif terhadap masyarakat Zimbabwe. Dengan harga pangan yang tinggi, membuat masyarakat miskin masih tidak bisa mengakses pangan meskipun telah menerima sejumlah uang dari WFP. Mengingat dana bantuan yang diterima dari WFP tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli bahan pangan tetapi juga untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok lainnya di masa krisis ekonomi.

Selain permasalahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dan perubahan iklim yang menyebabkan Zimbabwe masih dalam krisis pangan adalah karena disebabkan korupsi. Korupsi dan suap dapat memperburuk ketidaktahanan pangan, korupsi dapat menghilangkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses

pangan dan akses pada produksi pertanian. Uang yang seharusnya dipergunakan untuk membeli pangan justru digunakan untuk suap untuk mencapai kepentingan lain terutama oleh kelompok elit pejabat. Bantuan pangan yang diterima dari donor ini tidak didistribusikan tetapi disimpan dan digunakan sebagai senjata politik.

Hal ini disampaikan oleh Harry Thomas, duta besar AS untuk Zimbabwe tahun 2016-2018 dalam sebuah wawancara berita dengan *PBS News Hour*. Thomas memaparkan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya karena kekeringan tetapi karena perbuatan manusia “korupsi”. Korupsi besar-besaran dan mismanajemen yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan untuk mengakumulasi kekuasaan dan menimbun kekayaan (Nawaz, 2019). Jadi, meskipun saat ini ketika bantuan sedang dipusatkan pada peningkatan kualitas, kerawanan pangan di Zimbabwe tetap akan meningkat 2 kali lipat terutama di masa paceklik.

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Gerry Bourke, perwakilan WFP dalam wawancara tersebut yang menyatakan bahwa hiperinflasi dan ketersediaan mata uang lokal di Zimbabwe sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan WFP memilih untuk mengalihkan bantuan yang awalnya dalam bentuk uang tunai menjadi bantuan pangan berupa barang (Nawaz, 2019). Di saat WFP berusaha untuk mencari sumber makanan untuk masyarakat Zimbabwe sebaliknya pemerintah justru menimbun kekayaan.

Bahkan di tahun 2018, partai berkuasa di Zimbabwe terutama pada pemerintahan Mugabe sering dituduh menggunakan bantuan pangan sebagai alat politik untuk membeli suara. Termasuk pengelolaan distribusi pangan yang dilakukan oleh gubernur provinsi juga sudah sering dikritik karena dalam distribusi pangan terdapat laporan penduduk harus menunjukkan kartu Zanu-PF (partai yang berkuasa saat itu) (Phiri, 2018).

Korupsi birokrasi memiliki dampak pada ketidaktahanan pangan rumah tangga, korban suap secara statistik akan lebih rentan mengalami krisis pangan dibanding yang tidak menerima suap. Di Zimbabwe terdapat 33.7% orang yang juga 57.1% mengalami krisis pangan menjadi korban suap di Zimbabwe (Olabiyyi, 2022). Tidak hanya korupsi pada bantuan pangan, pemerintah Zimbabwe juga korupsi pada bantuan medis dan kemanusiaan ketika pandemi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi pada tahun 2019, Zimbabwe memperoleh nilai 24 dari 100 atau

peringkat 158 dari 180 negara (Transparency International, 2020). Pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan 200 juta dolar ZWL per bulan untuk masyarakat namun tidak ada informasi terkait pendistribusian yang dilakukan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial (Transparency International, 2020).

Suap dan korupsi yang dijadikan untuk mempertahankan kekuasaan dan menguasai suara rakyat ini menjadi salah satu alasan bagaimana peran WFP sebagai suatu organisasi internasional kesulitan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Zimbabwe. Bantuan pangan yang diberikan tidak langsung diterima oleh masyarakat tetapi disimpan ke dalam kantong kelompok elit dan jika pun didistribusikan tidak semua warga dapat mengakses pangan karena kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Forum dan Kemitraan WFP dalam Mengatasi Krisis Pangan Zimbabwe

Peran organisasi internasional yang kedua adalah arena berupa wadah atau forum bagi negara-negara untuk dapat bertemu, berdialog, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Terkait hal tersebut, WFP tidak memiliki forum khusus yang diadakan oleh WFP untuk membahas krisis pangan Zimbabwe. Namun, WFP dan anggotanya melakukan beberapa pertemuan dan forum untuk membahas krisis pangan yang dialami oleh Zimbabwe dan negara-negara di Afrika serta global seperti *World Food Forum* (WFF) dan Konferensi Perubahan Iklim (COP).

World Food Forum (WFF) dan *Food Security and Nutrition* (FSN) adalah forum netral yang diselenggarakan oleh *Food and Agriculture* (FAO) PBB untuk memfasilitasi para pembuat kebijakan dalam berdialog, berbagi pengetahuan, pembelajaran dan berdebat membahas isu ketahanan pangan, nutrisi, dan sistem pangan (FAO, 2023). Pada tahun 2021, WFP dan negara anggotanya ikut terlibat dalam forum ini yang khusus membahas pangan dan agrikultur. WFP juga menjadi pelaku penting dalam forum ini dalam berbagi pengetahuan sistem pangan bersama dengan FAO, dan *the International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

WFP juga terlibat aktif dalam forum konferensi perubahan iklim COP 27 dan COP 28. Dalam COP 27, WFP terlibat dengan memberikan solusi untuk mencegah dan meminimalkan kerugian akibat kerusakan pada mata pencaharian dan solusi untuk sistem pangan yang adil, kuat, dan lebih hijau (WFP, 2022). Dalam

konferensi tersebut WFP menyerukan kepada para pemimpin negara yang hadir untuk meningkatkan investasi yang dapat beradaptasi dengan iklim dan mentransformasi sistem pangan global. Sedangkan pada COP 28 (2023), WFP menyerukan tentang pentingnya kesadaran akan buruknya krisis iklim terhadap ketahanan pangan dan sebanyak 57 juta orang di dunia mengalami krisis pangan (WFP, 2023e). Melalui forum tersebut, WFP bertemu dan berbincang dengan negara-negara anggota untuk membahas solusi-solusi apa saja yang dapat melindungi masyarakat dari perubahan iklim dan konflik.

WFP juga ikut mendukung dan terlibat dalam pertemuan forum *Southern African Development Community* (SADC) yang membahas isu peningkatan ketahanan pangan dan nutrisi di Kawasan Afrika bagian selatan. Melalui forum tersebut, WFP bertemu dengan Presiden Emmerson Mnangagwa pada Jum'at 29 April 2022 guna mendesak Zimbabwe dan para negara anggota SADC untuk memproduksi pangan lebih untuk mencegah ketidaktahanan pangan sebagai respons terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina (Mavhunga, 2022). Berdasarkan desakan tersebut, pemerintah Zimbabwe mengadopsi “swasembada gandum dengan cara apa pun” dan bisa mengatasi krisis akibat perang (Mavhunga, 2022).

Pembicaraan tentang pentingnya krisis pangan dalam mengguncang ekonomi kawasan juga dibahas melalui kerja sama regional dalam pertemuan *Community's 42nd Summit* SADC di Kongo. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 negara anggota SADC yaitu Afrika Selatan, Angola, Botswana, Comoros, Republik Demokratik Kongo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Seychelles, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe. Para pemimpin negara-negara di Afrika bagian selatan mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya integrasi regional untuk meningkatkan posisi dan kualitas hidup yang kini sedang mengalami krisis pangan (Ocamringa, 2022).

WFP juga melakukan pertemuan reguler dengan pemerintah Zimbabwe dan para pemangku jabatan untuk membahas krisis pangan seperti membahas *zero hunger strategy* dan *country strategic plans*. Salah satu hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah diluncurkannya *roadmap food security* Zimbabwe melalui ditandatanganinya surat kesepahaman berupa *Letter of Understanding*

(LoU) oleh pemerintah Zimbabwe dan WFP pada 2023. LoU ini bertujuan untuk memformalkan kerja sama kemitraan (WFP, 2023d).

Meskipun tidak menyediakan wadah berupa forum secara langsung, WFP telah menjadi penghubung Zimbabwe dengan aktor lain seperti NGO, IGO, akademisi, sektor swasta, dan negara donor lain yang ingin ikut membantu dalam mengatasi krisis pangan Zimbabwe. Aktor lain selain WFP adalah organisasi internasional seperti UNDP, UNFPA, FAO, *Uni Commission*, *Green Climate Fund*, CARE, dan SUN. Adapun donor dari negara lain yang ikut bermitra dalam upaya ini adalah Amerika Serikat (USAID), Tiongkok, Rusia, Jepang, DFID Inggris, Kanada, Irlandia, Korea Selatan, Norwegia, dan lainnya.

USAID atau *United States Agency International Development* adalah badan bantuan luar negeri milik pemerintah Amerika Serikat (AS) dan merupakan mitra donor terbesar WFP yang telah lama ikut terlibat dalam upaya mengatasi krisis pangan di Zimbabwe. Sejak Zimbabwe merdeka di 1980, AS telah menginvestasikan hampir 4.5 miliar dolar AS kepada Zimbabwe untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung kekuatan ekonomi serta membantu permasalahan sosial Zimbabwe (WFP, 2023c). USAID melalui WFP memberikan bantuan kepada Zimbabwe pada 2023 sebesar 2 juta dolar AS yang ditujukan untuk 2.000 keluarga rentan di tiga daerah perkotaan Zimbabwe untuk satu tahun ke depan (WFP, 2023c). Total untuk bantuan pangan dari USAID melalui WFP telah mencapai lebih 8.9 juta dolar AS (WFP, 2023c).

Pada 2020, WFP menyatakan melalui Twitter bahwa mereka berhasil menyalurkan bantuan pangan yang berasal dari Tiongkok yang dibagikan kepada hampir 250.000 orang untuk memenuhi kebutuhan pangan harian warga Zimbabwe di puncak musim paceklik (New Zimbabwe, 2020). Bantuan oleh Tiongkok ini dianggap oleh WFP sebagai tindakan intervensi yang tepat. Bantuan ini dapat diterima Zimbabwe berkat penandatanganan perjanjian pemberian bantuan pangan darurat kepada tiga negara di Afrika bagian selatan yang dilakukan oleh WFP dan Tiongkok pada September 2019 (New Zimbabwe, 2020). Selain itu, WFP juga mengajukan permohonan mendesak sebesar 130 juta dolar AS untuk 4,1 juta penduduk Zimbabwe yang terkena dampak pandemi covid-19 dan kelaparan (New Zimbabwe, 2020).

Selain menyalurkan bantuan dari AS dan Tiongkok, WFP menghubungkan bantuan dari Rusia untuk Zimbabwe. WFP menyambut pertolongan dari Rusia sebesar 1.5 juta dolar AS untuk membantu 100.000 penduduk di distrik Hwange, Nkayi, dan Zvishavane yang mengalami kekeringan (WFP, 2020a). Bantuan tersebut membuat WFP dapat membeli 1.000 metrik ton makanan yang nantinya akan diberikan kepada warga di daerah-daerah rentan (WFP, 2020a). Bantuan yang disalurkan oleh WFP adalah dari Jepang, sejak 2012 dengan 26 juta dolar AS (WFP, 2023b). Bantuan tersebut digunakan WFP untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan kebun kecil, penyediaan pelatihan, peternakan, reklamasi lahan yang dapat menjadi mata pencaharian baru warga Zimbabwe.

WFP juga bermitra dan berkolaborasi dengan lembaga sosial masyarakat (NGO) untuk melakukan program-program WFP. Salah satu mitra terbesar WFP dalam upaya mengatasi krisis pangan Zimbabwe adalah LSM CARE. Selain itu, WFP juga bermitra dengan pergerakan *Scaling Up Nutrition* (SUN) dalam program *SUN Business Network* (SBN) untuk membantu bisnis swasta yang terintegrasi dengan peningkatan gizi nasional yang diselenggarakan oleh *Global Alliance for Improve Nutrition* (GAIN) dan WFP.

UNWFP sebagai Aktor dalam Mengatasi Krisis Pangan Zimbabwe

Sejak didirikannya PBB dan NATO, IGO “*International Government Organization*” telah menjadi aktor penting dalam komunitas internasional atau dalam studi Hubungan Internasional. Contohnya seperti PBB dan UE memiliki kemampuan untuk membuat peraturan dan menjalankan kekuasaan di area negara-negara anggotanya serta memiliki dampak secara global (Harvard Law School, 2022). Sedangkan menurut Archer, peran organisasi internasional sebagai aktor adalah ketika OI dapat bertindak di kancah global secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar serta dapat berpengaruh pada perkembangan peristiwa global (Archer, 2001). Berdasarkan hal tersebut, organisasi internasional seperti WFP yang masih bergantung pada tindakan anggotanya bisa dianggap sebagai bukan aktor dalam upaya mengatasi krisis ini. Namun, Archer juga menambahkan bahwa suatu organisasi internasional dapat menjadi aktor jika dapat memberikan pengaruh pada jalannya peristiwa global.

Peran WFP sebagai aktor dalam mengatasi masalah krisis pangan global dan khususnya di Zimbabwe dapat dilihat dari bagaimana WFP memosisikan dirinya sebagai pelaku dalam isu krisis pangan. WFP merupakan organisasi kemanusiaan terbesar yang berfokus pada isu-isu untuk mengentaskan kelaparan dan menargetkan *zero hunger* di berbagai negara. WFP memosisikan dirinya sebagai pelaku dengan menjadi pemberi bantuan pangan dan sebagai pelaku utama dalam menjalankan program-program yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. WFP juga ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam membuat rencana pembangunan yang berfokus pada penyelesaian krisis pangan, mengusulkan kebijakan, serta ikut mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan pangan yang dihadapi oleh negara.

Peran WFP sebagai aktor dapat dilihat dari posisi WFP dalam kerja sama peluncuran peta ketahanan pangan Zimbabwe pada tahun 2023. Pemerintah Zimbabwe dan WFP menandatangani Surat Kesepahaman atau *Letter Of Understanding* (LoU) untuk meresmikan kolaborasi peningkatan sistem pangan Zimbabwe. WFP dan pemerintah Zimbabwe sepakat untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas dalam menanggapi keadaan darurat dan mendorong investasi ke wirausaha bidang pertanian (WFP, 2023d). Penandatanganan ini menunjukkan posisi WFP yang berperan sebagai mitra tidak hanya sebagai instrumen atau alat pemerintah Zimbabwe dalam mengatasi krisis pangan.

WFP sebagai mitra dalam kolaborasi ini memiliki kepentingan yaitu untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai *zero hunger* dan mewujudkan Zimbabwe sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan. Sehingga, dalam kerja sama ini tanggung jawab tercapainya tujuan ketahanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Zimbabwe tetapi WFP sebagai pelaku atau mitra Zimbabwe. Hal tersebut disampaikan oleh Simon Masanga, Sekretaris tetap, Kementerian Pelayanan Publik, Buruh, dan Kesejahteraan Sosial bahwa ini merupakan komitmen bersama dan pencapaian tujuan bersama (WFP, 2023d).

Adapun peran WFP sebagai mitra dalam upaya mengatasi krisis pangan selanjutnya adalah sebagai pemberi bantuan berupa penyediaan pangan dan transfer uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak krisis di wilayah pedesaan, perkotaan, dan di kamp-kamp pengungsi “Tongogara Refugee Camp” (WFP,

2023f). Pemberian bantuan melalui WFP *Lean Season Assistance (LSA) Programme* kurang lebih diberikan kepada 1,5 juta penduduk Zimbabwe di 28 distrik pedesaan (WFP, 2021a). Pada 2019, WFP telah mendistribusikan bantuan berupa bahan pangan sebanyak 2.399 metrik ton dan telah mentransfer uang sebanyak 4.5 juta dolar AS kepada 706.247 orang (WFP, 2021b).

Pada 2020, berdasarkan laporan tahunan WFP telah memberikan bantuan kepada 4.2 juta penduduk Zimbabwe dengan mendistribusikan 229.870 metrik ton pangan dan mentransfer uang tunai 32.3 juta dolar AS (WFP, 2021b). Pada April 2021, menurut laporan dari WFP pada *country brief* diperkirakan sebanyak 7,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dari Jumlah tersebut, WFP baru bisa membantu 1.8 juta orang setelah mendistribusikan pangan sebanyak 2.598 metrik ton dan mentransfer 3.8 juta dolar AS (WFP, 2021b). Di tahun 2022, WFP telah memberikan bantuan pangan sebanyak 9.824 metrik ton dan mentransfer 428.592 dolar AS uang tunai dan diperkirakan telah membantu 486.000 lebih orang melalui bantuan dan transfer tunai (WFP, 2022a).

Berikut adalah tabel pemberian bantuan yang telah didistribusikan oleh WFP kepada Zimbabwe dari 2019 hingga 2022 untuk menolong penduduk yang terdampak krisis pangan Zimbabwe.

Tabel 2. Distribusi Bantuan oleh WFP *Lean Season Assistance (LSA)* 2019-2022

Bulan Tahun	Bantuan Pangan (metrik ton)	Transfer Uang Tunai (Dolar AS)	Penduduk yang terbantu (orang)
Januari 2019	2.399	4.5 juta	706.247
2020	229.870	32.3 juta	4.2 juta
April 2021	2.598	3.8 juta	1.8 juta
November 2022	9.824	428.592	486.608

Sumber: diolah oleh penulis dari WFP *Zimbabwe Country Brief Report* 2019-2022

WFP mengirim uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih apa yang mereka butuhkan dan kapan mereka membutuhkannya (WFP, 2024). WFP melalui program ini dapat mendukung 19.000 penduduk Zimbabwe di perkotaan Epworth dengan setiap transaksi diperkirakan sebesar 9 dolar AS untuk

tiap anggota keluarga (WFP, 2020b). Dana tersebut diperoleh dari *Department for International Development* (DFID) Inggris dan ECHO².

Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan dengan kemitraan dengan DanChurchAid. Uang yang diterima oleh penduduk tersebut akan dikonversikan ke dalam dolar Zimbabwe sehingga dapat dipergunakan untuk membeli komoditas pangan di pasar lokal (WFP, 2020b). Melalui program bantuan WFP, penduduk Zimbabwe dapat mengakses komoditas pangan dan membeli kebutuhan mereka sesuai dengan keinginan penduduk.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa WFP juga berperan sebagai pelaku yang membantu pemerintah Zimbabwe merencanakan dan membuat kebijakan. WFP ikut terlibat dalam perumusan *Country Strategic Plans* tiap 5 tahun sekali. Perumusan strategi ini di dasarkan pada Strategi Pembangunan Nasional Zimbabwe 1 dan komitmennya pada agenda SDGs 17 tahun 2030. Dalam hal ini, terlihat bahwa WFP seakan memiliki otoritas dan hak tertentu untuk dapat mengarahkan pemerintah Zimbabwe dalam membuat keputusan. Namun dalam pelaksanaannya, kapasitas WFP masih belum cukup untuk dapat mengontrol seluruh jalannya program peningkatan sistem pangan di Zimbabwe. Hal ini sesuai dengan Archer (Archer, 2001), bahwa WFP masih terbatas kapasitasnya yang bergantung pada rekomendasi, resolusi, dan saran dari negara-negara anggota.

WFP masih merupakan aktor yang belum independen karena masih bergantung pada negara anggotanya. WFP hanya bisa mendesak anggotanya dan memohon donasi bantuan dari negara anggotanya dan mitra program. WFP memang memiliki *power* dan memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan warga sipil Zimbabwe dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengambil keputusan dalam upaya menghilangkan kelaparan “*zero hunger*” (WFP, 2023d). Namun, dalam pelaksanaan program-programnya WFP tidak memiliki kontrol penuh untuk bisa mengatur pemerintah Zimbabwe dan masih memerlukan komitmen intervensi pemerintah Zimbabwe dalam membantu mewujudkan kepentingan penyelesaian krisis pangan ini.

² *European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations* (ECHO) merupakan salah satu bagian dari Uni Eropa yang berfokus pada urusan bantuan kemanusiaan.

WFP dilihat dari posisinya dalam perkembangan isu krisis pangan dapat dikatakan sebagai aktor penting karena sebagai pengusul dan pelaksana proyek bantuan pangan serta mampu mengubah perspektif negara anggotanya terkait krisis pangan yang mengancam keamanan nasional. Namun, pengaruh WFP sebagai aktor di Zimbabwe masih belum membawa peningkatan yang sangat signifikan pada tercapainya tujuan *zero hunger* yang diusung oleh WFP dan Zimbabwe. Kurangnya pengaruh WFP dalam mengatasi krisis pangan ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemerintah Zimbabwe.

SIMPULAN

Peran UNWFP dalam mengatasi krisis pangan Zimbabwe pada tahun 2019-2023 adalah sebagai instrumen, namun tidak sepenuhnya berperan sebagai arena dan aktor. Peran WFP tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai arena dan aktor karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Peran WFP sebagai instrumen yaitu alat yang digunakan oleh Zimbabwe untuk mencapai tujuannya mengatasi krisis pangan. WFP memberikan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Zimbabwe untuk dapat bertahan di masa paceklik dan bangkit dari krisis pangan melalui beberapa program seperti bantuan pangan dan transfer tunai.

Namun, peran UNWFP sebagai arena untuk forum diskusi dan kemitraan terbatas, hal ini karena tidak adanya forum yang diselenggarakan WFP untuk membahas isu pangan Zimbabwe secara khusus. Sebagai aktor, UNWFP telah berpartisipasi dalam kemitraan dengan pemerintah Zimbabwe dan negara donor lainnya, namun pengaruhnya terhadap kebijakan Zimbabwe dalam perkembangan ketahanan pangan masih terbatas karena kurangnya otoritas WFP atas kebijakan domestik Zimbabwe.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa WFP memiliki peran sebagai aktor melalui kemitraannya dengan Zimbabwe dan kontribusinya dalam bantuan darurat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Namun, terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kondisi peningkatan ketahanan pangan di Zimbabwe yaitu pemerintah Zimbabwe. Sehingga perlu penting bagi WFP mengeksplorasi peluang untuk menyelenggarakan forum yang lebih khusus serta

diperlukan sinergi dengan aktor lain yang terlibat agar terdapat kepatuhan dan berkomitmen mengimplementasikan resolusi yang disepakati.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya penelitian lapangan untuk memperkaya data penelitian. Selain itu, diperlukan kolaborasi kerangka teori/konsep lain seperti ketahanan pangan, bantuan luar negeri, kebijakan luar negeri dan ketergantungan untuk dapat memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku organisasi dan kebijakan negara anggota sehingga dapat menjelaskan kompleksitas dan efektivitas peran organisasi internasional dalam sistem internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organization Third Edition*. Routledge.
- Britannica. (2023). *World Food Programme*. Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/World-Food-Programme>
- Chipato, F., & Wang, L. (2019). Examining the role of food aid at community level: Insights from Masvingo Province, Zimbabwe. *European Journal of Social Sciences Studies*., 125–139.
- FAO. (1996). *World Food Summit 1996*. The Food and Agriculture Organization.
<http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm>
- FAO. (2018). *Zimbabwe Lifts Import Ban on Basic Commodities, Food Price Monitoring and Analysis*. UN Food and Agriculture.
<https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1160273/>
- FAO. (2023). *About the FSN Forum*. Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum). <https://www.fao.org/fsnforum/background>
- FNC. (2024). *Food and Nutrition Council in Zimbabwe*. FNC. <https://fnc.org.zw/>
- FSIN. (2021). *Global Report on Food Crises 2021*. Food Security Information Network.
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2021_050521_med_0.pdf
- FSIN. (2022). *Global Report on Food Crises 2022*. Food Security Information Network.

- https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2022_Final_Report.pdf
- Gallar, M. (2023). *20 years of WFP in Zimbabwe (part 1)*. Medium World Food Programme Insight. <https://medium.com/world-food-programme-insight/20-years-of-wfp-in-zimbabwe-part-1-1a93df0bfe3>
- Harvard Law School. (2022). *Intergovernmental Organizations (IGOs)*. <https://hls.harvard.edu/bernard-koteen-office-of-public-interest-advising/about-opia/what-is-public-interest-law/public-service-practice-settings/international-public-interest-law-practice-setting/intergovernmental-organizations-igos/#:~:text=Since%2520th>
- IFRC. (2020). *Zimbabwe: Tropical Cyclone Idai Final Report, DREF Operation n°: MDRZW014*. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. <https://reliefweb.int/report/zimbabwe/zimbabwe-tropical-cyclone-idai-final-report-dref-operation-n-mdrzw014>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications.
- Langa, V. (2023). *Zimbabwe: Mnangagwa boasts of food security, but WFP says many struggle*. The African Report. <https://www.theafricareport.com/319117/zimbabwe-mnangagwa-boasts-of-food-security-but-wfp-says-many-struggle/>
- Majuru, L. (2019). *Zimbabwe's New Grain Policy Has Farmers Eyeing Black Market*. Global Press Journal. <https://globalpressjournal.com/africa/zimbabwe/zimbabwes-new-grain-policy-farmers-eyeing-black-market/>
- Mavhunga, C. (2022). *WFP Urges Zimbabwe, SADC to Produce More Food to Avoid Insecurity*. VOA. <https://www.voanews.com/amp/wfp-urges-zimbabwe-sadc-to-produce-more-food-to-avoid-insecurity-/6570349.html>
- Nawaz, A. (2019). Wawancara dengan Harry Thomas dan Gerry Bourke tentang How climate and corruption have combined to create Zimbabwe's food crisis [Broadcast]. Dalam *PBS News*.

- Ndlovu, Sibonokuhle; Mpofu, Moreblessings; Moyo, Philani; Phiri, Keith; Dube, T. (2021). Urban household food insecurity and cash transfers in Bulawayo townships, Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1995995.
- Ndlovu, T., & Ndlovu, S. (2019). Are cash transfers the panacea to local involvement in humanitarian decision-making? Evidence from World Vision projects in Umzingwane. *Jàmá: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(1), 1–8.
- New Zimbabwe. (2020). *WFP commends China for providing food assistance to Zimbabwe*. New Zimbabwe. <https://www.newzimbabwe.com/wfp-commends-china-for-providing-food-assistance-to-zimbabwe/>
- Ocamringa, C. (2022). *SADC calls for the deepening of regional cooperation over food crisis*. Youtube SABC News. <https://www.youtube.com/watch?v=5YDarUPWwmk>
- Olabiyyi, O. M. (2022). The effect of bureaucratic corruption on household food insecurity: evidence from Sub-Saharan Africa. *International Society for Plant Pathology and Springer Nature B.V*, 411–426.
- Phiri, M. (2018). *Zimbabwe ruling party accused of using food aid to buy votes*. Refworld. <https://www.refworld.org/docid/5bc9a19410d.html>
- S. I. 145 of 2019. (2019). *Statutory Instrument 145 of 2019: Grain Marketing (Control of Sale of Maize) Regulations, 2019*. Veritas Zimbabwe. [www.veritaszim.net%2Fsites%2Fveritas_d%2Ffiles%2FSI%25202019%2520-%2520145%2520Grain%2520Marketing%2520\(Control%2520of%2520Sale%2520of%2520Maize\)%2520Regulations%2C%25202019.pdf](http://www.veritaszim.net%2Fsites%2Fveritas_d%2Ffiles%2FSI%25202019%2520-%2520145%2520Grain%2520Marketing%2520(Control%2520of%2520Sale%2520of%2520Maize)%2520Regulations%2C%25202019.pdf)
- Transparency International. (2020). *Zimbabwe's Deadly Duo: Covid-19 & Corruption*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/blog/zimbabwes-deadly-duo-covid-19-and-corruption>
- UN. (2019). *Zimbabwe 'facing worst hunger crisis in a decade.'* United Nations News. <https://news.un.org/en/story/2019/12/1052621>
- UN. (2023). *Around 258 million need emergency food aid: UN-backed report*. United Nations News. <https://news.un.org/en/story/2023/05/1136332>

- WFP. (2017). Zimbabwe Country Strategic Plan (2017-2021). Dalam *World Food Programme*.
- WFP. (2020a). *Russia helps WFP provide food to drought affected communities in Zimbabwe*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/russia-helps-wfp-provide-food-drought-affected-communities-zimbabwe>
- WFP. (2020b). *WFP mobile money transfers change urban lives in Zimbabwe*. Medium World Food Programme. <https://medium.com/world-food-programme-insight/wfp-mobile-money-transfers-change-urban-lives-in-zimbabwe-168cfa9a8996>
- WFP. (2021a). *WFP Zimbabwe Country Brief*. World Food Programme. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000128158/download/>
- WFP. (2021b). *World Food Programme Zimbabwe 2020 Annual Country Report Highlights*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/publications/world-food-programme-zimbabwe-2020-annual-country-report-highlights>
- WFP. (2022). *WFP at COP 27: Climate adaptation solutions needed to halt global food crisis*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/wfp-cop-27-climate-adaptation-solutions-needed-halt-global-food-crisis>
- WFP. (2023a). *Government of Zimbabwe helps meet refugees' food needs*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/government-zimbabwe-helps-meet-refugees-food-needs>
- WFP. (2023b). *Japan helps boost community resilience in Zimbabwe's rural areas*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/japan-helps-boost-community-resilience-zimbabwes-rural-areas>
- WFP. (2023c). *USAID enables WFP to provide support to Zimbabwe's urban communities*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/usaid-enables-wfp-provide-support-zimbabwes-urban-communities>
- WFP. (2023d). *WFP and Government of Zimbabwe Launch Roadmap Toward Food Security*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/wfp-and-government-zimbabwe-launch-roadmap-toward-food-security>
- WFP. (2023e). *What's WFP doing at COP28?* World Food Programme. <https://www.wfp.org/news/whats-wfp-doing-cop28>

- WFP. (2023f). *Where We Work: Zimbabwe*. World Food Programme.
<https://www.wfp.org/countries/zimbabwe>
- WFP. (2023g). *Who We Are*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/who-we-are>
- WFP. (2024). *Cash Transfers*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/cash-transfers>
- World Data Atlas. (2020). *Zimbabwe- Maize Production Quantity*. Knoema.
<https://knoema.com/atlas/Zimbabwe/topics/Agriculture/Crops-Production-Quantity-tonnes/Maize-production>

e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-0040